



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik (D.h. P. Natadirja No. 271) Km. 8 Bengkulu  
Telp. (0736) 345237 – 343082 Fax. (0736) 345311

Nomor : S- ~~1028~~ /WPB.09/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Laporan Kajian Fiskal  
Regional (KFR) Triwulan II TA. 2018

06 Agustus 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran  
di Jakarta

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, berikut disampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Bengkulu Triwulan II TA. 2018. Laporan tersebut dalam bentuk *softcopy* telah kami sampaikan melalui e-mail dengan alamat [lo.ditpa@gmail.com](mailto:lo.ditpa@gmail.com)

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,  
  
197305271994031001 |



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan II  
2018

**Penyusun:**

Penanggung Jawab: Rinardi | Ketua Tim: Abdullah |  
Editor: Wawan Setiawan | Desain Grafis: Al Udin |  
Anggota: Andi Hendrawan | Tengku Yustisia | Yunisah | Jumadi I

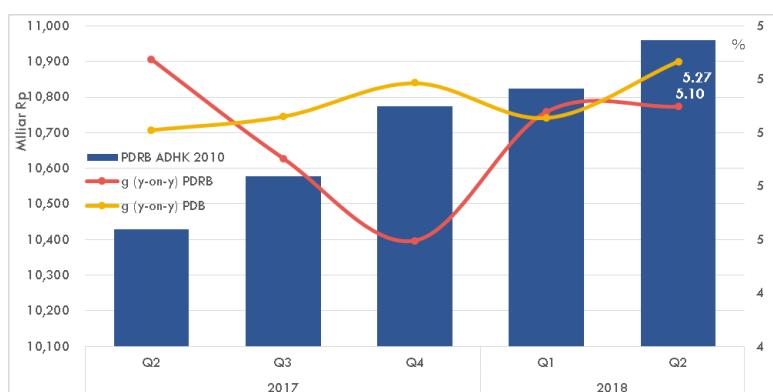
**KANWIL DITJEN**  
**PERBENDAHARAAN**  
*Provinsi Bengkulu*

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai Rp16,35 triliun sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp10,96 triliun. Angka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen (q-to-q) dibandingkan Triwulan I Tahun 2018 dan tumbuh sebesar 5,10 persen (y-on-y) namun sedikit mengalami perlambatan (0,18 persen) dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2017. Secara nasional, pertumbuhan Provinsi Bengkulu tercatat lebih rendah dari angka nasional (5,27 persen) namun berada di atas laju rata-rata pertumbuhan regional Sumatera (4,65 persen). Angka pertumbuhan tersebut berada pada peringkat kelima di bawah Provinsi Lampung dan Sumatera Utara.

**Grafik I.1 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (g) Bengkulu**



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

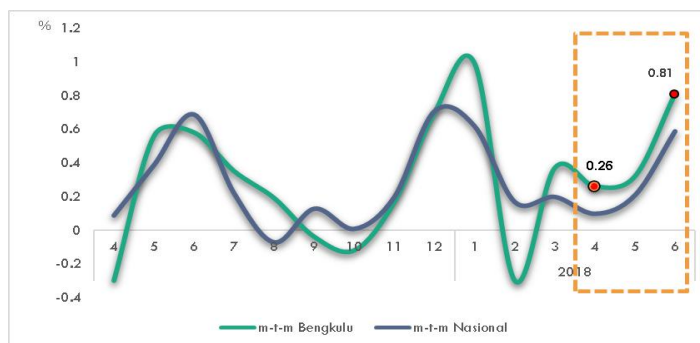
Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2018 dilihat dari segi lapangan usaha, masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yang sama dengan periode sebelumnya yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (28,65 persen), perdagangan besar dan eceran (14,85 persen), serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,98 persen). Berdasarkan perkembangan triwulanan, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan dimana pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas (10,39 persen) dan perdagangan besar dan eceran (8,51 persen) seiring dengan peningkatan perdagangan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,19 persen) yang disebabkan efek musim pancaroba dan momen pesta pernikahan, persiapan keberangkatan haji dan tahun ajaran baru sekolah.

Sedangkan struktur perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2018 dilihat dari segi pengeluaran menunjukkan semua komponen tumbuh positif. Perekonomian ditopang oleh konsumsi rumah tangga (64,24 persen) diikuti oleh komponen impor (63,63 persen) dan komponen PMTB (39,44 persen). Berdasarkan perkembangan triwulanan, tercatat pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi (13,01 persen) seiring dengan peningkatan realisasi APBN dan APBD, pelaksanaan program kegiatan kementerian/OPD dan pencairan THR/gaji 14. Selain itu, komponen impor barang dan jasa sebesar tumbuh sebesar 9,35 persen diikuti komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,08 persen.

## B. Inflasi

Perkembangan harga barang dan jasa secara umum untuk Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kota Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan (inflasi tahun kalender (y-t-d) sebesar 2,47 persen). Angka ini berada di atas inflasi nasional yaitu 1,90 persen.

**Grafik I.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu dan Nasional (m-t-m)**



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Kenaikan harga secara umum pada bulan April 2018 tercatat sebesar 0,26 persen (berada di atas inflasi nasional yaitu 0,10 persen). Angka inflasi ini disebabkan naiknya harga pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,55 persen yang terutama dipicu oleh perubahan harga angkutan udara sebesar 6,16 persen. Selain itu, inflasi bulan April 2018 disebabkan kenaikan kelompok pengeluaran harga makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,33 persen. Kelompok pengeluaran ini menyumbang inflasi sebesar 0,05 persen. Selain terjadi inflasi, pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik gas dan bahan bakar serta kelompok pengeluaran bahan makanan mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,33 persen dan -0,21 persen.

Perkembangan harga pada bulan Mei 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar sebesar 0,32 persen (sedangkan secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,21 persen). Seperti halnya bulan sebelumnya, pada bulan Mei 2018 inflasi terutama disebabkan naiknya harga pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,25 persen yang terutama dipicu oleh perubahan harga angkutan udara sebesar 5,98 persen. Selain itu, inflasi bulan Mei 2018 disebabkan kenaikan kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,16 persen dikarenakan lonjakan harga daging ayam ras yang mencapai 13,39 persen. Kelompok pengeluaran ini menyumbang inflasi sebesar 0,04 persen. Seluruh komponen pengeluaran lain mengalami inflasi kecuali pada kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami deflasi sebesar -0,42 persen.

Sedangkan pada bulan Juni 2018 tercatat merupakan inflasi tertinggi pada Triwulan II Tahun 2018 dimana terjadi *over demand* atas komoditi berkenaan dengan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Inflasi bulan Juni 2018 sebesar 0,81 persen (secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,59 persen). Penyebab utama inflasi yaitu kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,01 persen. Kenaikan harga angkutan udara sebesar 5,77 persen serta angkutan antar kota sebesar 24,51 persen menjadi faktor pendorong inflasi pada kelompok ini. Selain transportasi, kelompok bahan makanan juga memicu inflasi bulan Juni 2018 dimana kenaikan kelompok bahan makanan mencapai 1,12 persen yang terutama disumbang oleh kenaikan harga daging ayam ras sebesar 2,45 persen.

Sedangkan fluktuasi harga selama Triwulan II Tahun 2018 terlihat pada perkembangan harga dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Rata-rata inflasi *year on year* pada periode ini sedikit lebih tinggi (3,47 persen) dari angka inflasi nasional (3,27 persen). Dalam periode Triwulan II yang bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu melakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud antisipatif menahan lonjakan harga khususnya komoditas bahan makanan. Upaya TPID tersebut antara lain (Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Bengkulu Edisi Mei 2018):

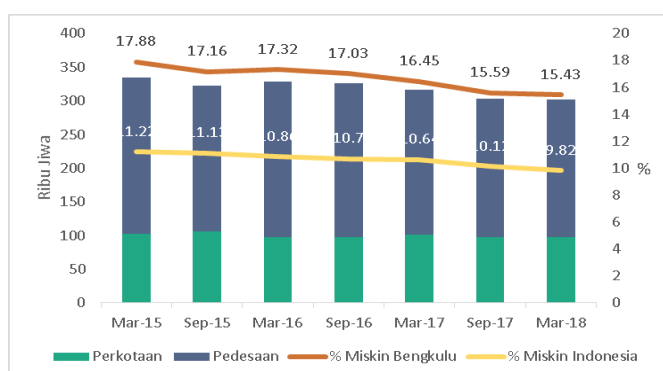
1. TPID Provinsi dan TPID Kota Bengkulu berkoordinasi dalam pelaksanaan pasar murah pada bulan Ramadhan yang akan difokuskan mulai H-14 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini disebabkan pada periode tersebut umumnya pedagang akan mengambil profit taking yang cukup tinggi. Pelaksanaan pasar murah oleh Pemerintah Provinsi akan dilakukan di 10 titik, sementara Pemerintah Kota akan melaksanakan di 33 titik yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Bengkulu.
2. Pengendalian inflasi difokuskan pada komoditas yang bergejolak dan memiliki bobot inflasi tinggi antara lain Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Minyak Goreng, Telur Ayam Ras, dan Beras.
3. Melakukan inspeksi gudang pasokan distributor serta inspeksi pasar tradisional dengan melibatkan Satgas Pangan.
4. Melakukan pertemuan dengan MUI dan ustadz se-kota Bengkulu dalam rangka pengendalian konsumsi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Dari rangkaian kegiatan dimaksud, angka inflasi berada pada level terjaga sesuai target inflasi nasional tahun 2018 yaitu sebesar 3,5% ± 1%.

### C. Indikator Kesejahteraan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya tren positif dimana terjadi penurunan persentase penduduk miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan. Posisi per Maret 2018 angka kemiskinan sebesar 301,81 ribu jiwa (15,43 persen) atau berkurang 15,17 ribu jiwa dibandingkan periode Maret 2017.

**Grafik 1. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Tahun 2015 – 2018**



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

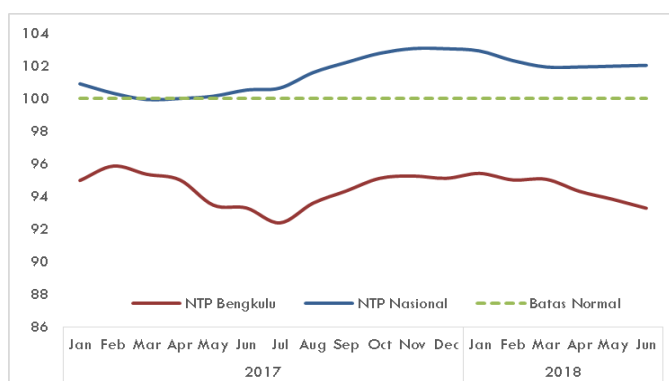
Konsentrasi penduduk miskin masih didominasi penduduk di pedesaan. Sejumlah 204,35 ribu jiwa atau 67,71 persen dari total penduduk miskin berada di pedesaan. Lebih lanjut berdasarkan perkembangan garis kemiskinan (kenaikan garis kemiskinan sebesar 6,83 persen dibandingkan periode Maret 2017 menunjukkan bahwa komoditi makanan masih berperan lebih besar dibandingkan dengan komoditi

bukan makanan. Komoditi makanan yang memberikan dampak terhadap kemiskinan diantaranya beras, rokok kretek filter, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Penurunan persentase penduduk miskin dimaksud perlu dicermati. Secara nasional angka persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu masih berada di atas persentase nasional (9,82 persen). Selanjutnya berdasarkan indikator ketimpangan pendapatan/pengeluaran (gini ratio), terjadi sedikit pengingkatan ketimpangan. Gini ratio pada bulan Maret 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,362 atau naik 0,011 dibandingkan periode Maret 2017 (0,351). Sedangkan berdasarkan indeks kemiskinan, terjadi pergeseran tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dimana indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada Maret 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 2,51 sementara di daerah perdesaan sebesar 2,64. Sementara itu nilai Indeks Keparahakan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,56 sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,63.

Di sisi lain, oleh karena dominasi sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu, maka perkembangan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai *proxy* kesejahteraan petani menjadi hal yang relevan untuk melihat tingkat kesejahteraan. NTP menilai tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Perkembangan NTP sebagaimana grafik 1.4 di bawah.

**Grafik 1. 4 Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – 2018**



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Perkembangan NTP menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan. Posisi NTP Provinsi Bengkulu masih defisit dimana berada di bawah batas normal (100). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Dengan kata lain, pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Berdasarkan statistik, NTP Provinsi Bengkulu juga berada di bawah NTP Nasional dan selama Triwulan II Tahun 2018 menunjukan tren yang menurun. Rata-rata NTP berada pada level 93,81 atau turun 1,35 persen dibandingkan rata-rata Triwulan I Tahun 2018. Kondisi ini terutama disebabkan adanya penurunan pada subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat khususnya harga komoditas perkebunan rakyat yaitu kelapa sawit dan karet.

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2018 diharapkan mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien, dengan berfokus pada penganggaran belanja yang makin produktif sesuai prioritas nasional. Tiga strategi fiskal yang ditempuh yaitu optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi; efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas; serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Alokasi belanja negara pada APBN di wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp14,19 triliun, sedangkan target pendapatan negara adalah sebesar Rp2,60 triliun. Rincian selengkapnya pada tabel II.1 di bawah ini:

**Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu  
s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>2.372,90</b>	<b>833,05</b>	<b>2.605,85</b>	<b>900,42</b>
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.372,90	833,05	2.605,85	900,42
1. Penerimaan Pajak	2.000,00	676,62	2.030,00	742,96
2. PNPB	235,73	156,43	575,85	157,46
II. HIBAH	-	-	-	-
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>14.310,68</b>	<b>6.600,95</b>	<b>14.377,61</b>	<b>6.231,30</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	4.105,67	1.495,41	4.631,46	1.696,15
1. Belanja Pegawai	1.430,12	664,36	1.531,96	735,38
2. Belanja Barang	1.440,78	473,12	1.878,92	641,32
3. Belanja Modal	1.221,30	353,62	1.206,39	315,49
4. Belanja Bantuan Sosial	13,47	4,31	14,19	3,96
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	10.205,01	5.105,54	9.746,15	4.535,15
1. Transfer ke Daerah	9.169,67	4.484,93	8.773,01	3.958,51
a. Dana Perimbangan	9.169,67	4.484,93	8.773,01	3.958,51
1) Dana Alokasi Umum	6.574,26	3.545,84	6.420,21	3.203,46
2) Dana Bagi Hasil	336,39	163,58	276,37	93,21
3) Dana Alokasi Khusus	2.259,02	775,51	2.076,43	661,84
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	-	-	-	-
2. Dana Desa	1.035,34	620,61	973,14	576,64
<b>C. SURPLUS DEFISIT</b>	<b>(11.937,78)</b>	<b>(5.767,90)</b>	<b>(11.771,76)</b>	<b>(5.330,88)</b>

Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, upaya optimalisasi Pendapatan Negara mulai terwujud, Penerimaan Dalam Negeri yang dicapai adalah sebesar Rp900,42 miliar atau meningkat sekitar Rp77,35 miliar dibanding Triwulan II Tahun 2017 yaitu Rp833,05 miliar. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah juga menguatkan kualitas belanja

negara melalui peningkatan kualitas belanja modal. Salah satu caranya adalah belanja dengan lebih produktif. Selain itu, efisiensi belanja nonprioritas, seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi program perlindungan sosial, menjaga, dan fokus pada anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik. Belanja yang dilakukan Pemerintah juga berfokus kepada keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan.

Dari tabel II.1 di atas dapat dilihat bahwa dari sisi Pendapatan Negara, sebagian besar (82,51 persen) masih berasal dari penerimaan perpajakan Rp742,96 miliar. Adapun porsi PNBP (termasuk pendapatan BLU) adalah sebesar Rp157,46 miliar atau 17,46 persen. Oleh karena itu memang sangat diperlukan upaya intensifikasi pungutan PNBP, maupun ekstensifikasi potensi jenis-jenis PNBP baru.

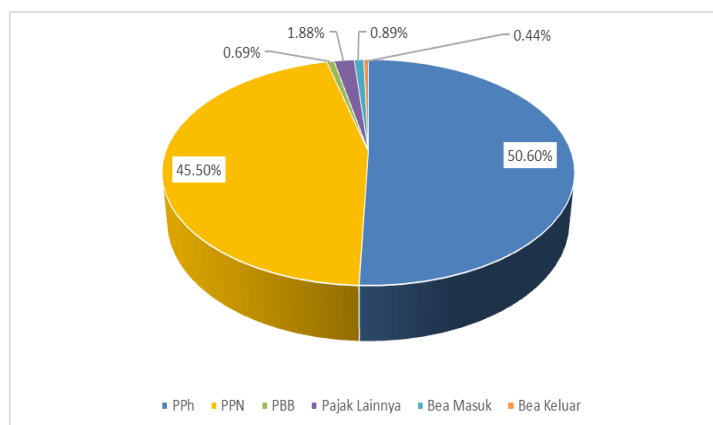
Sedangkan dari sisi Belanja Negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018 mencapai Rp1.696,15 miliar atau mencapai tingkat realisasi anggaran 36,62 persen dari pagu Belanja Pemerintah Pusat. Tingkat realisasi anggaran Belanja Barang mencapai 34,13 persen, sedangkan Belanja Modal mencapai 26,15 persen. Belanja Pegawai mencapai tingkat realisasi tertinggi yaitu 48 persen. Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp4.535,15 miliar.

## A. Pendapatan Negara

### 1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp742,96 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode sampai dengan Triwulan II tahun 2017, dimana realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp676,62 triliun, maka terdapat peningkatan sekitar Rp66,34 miliar. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendorong perbaikan kinerja keuangan negara hingga Mei 2018. Dua sektor itu membuat penerimaan negara tumbuh lebih tinggi. Penerimaan PPh dan penerimaan PPN masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan perpajakan, 96,10% dari seluruh penerimaan perpajakan merupakan penerimaan PPh dan PPN. Berikut Komposisi Penerimaan Perpajakan di wilayah Bengkulu sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018:

**Grafik II.1 Komposisi Penerimaan Perpajakan di Wilayah Bengkulu sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018**



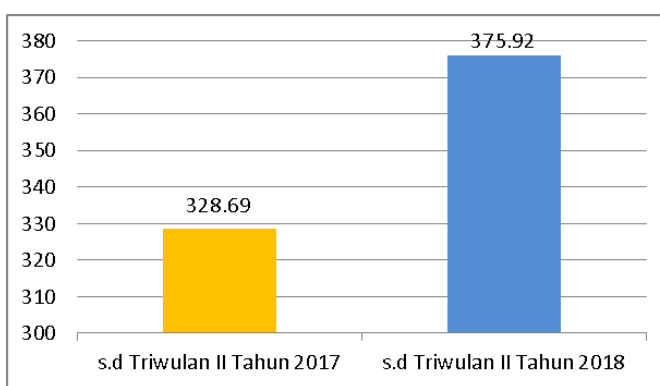
Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)



a) Pajak Penghasilan (PPH)

Dari Grafik II.2 terlihat bahwa realisasi penerimaan PPh secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018 mengalami peningkatan 14,69% atau sebesar Rp47,23 miliar apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan PPh didominasi oleh penerimaan PPh 22 Impor, PPh pasal 25/29 Badan, dan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi. Faktor peningkatan realisasi PPh adalah jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar mengalami tingkat kepatuhan yang meningkat yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, meningkatnya kegiatan usaha pada sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran pada Triwulan II Tahun 2018.

**Grafik II.2 Perbandingan Penerimaan PPh Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**

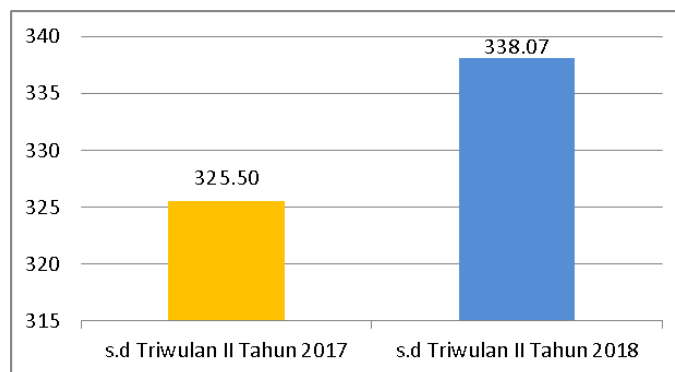


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Seperti tahun sebelumnya, selain penerimaan PPh, penerimaan PPN masih mendominasi dalam kontribusi terhadap penerimaan negara. Realisasi penerimaan PPN secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding realisasi penerimaan PPN pada Triwulan II Tahun 2017, yaitu meningkat sekitar Rp 12,57 miliar atau 3,86 persen. Penerimaan PPN dan PPnBM terus naik didorong pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor.

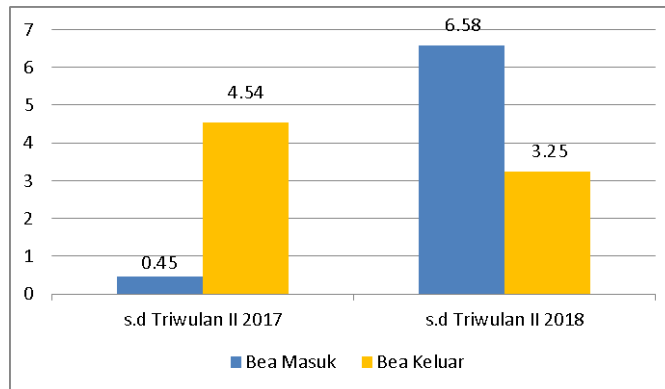
**Grafik II.3 Perbandingan Penerimaan PPN Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Pajak Perdagangan Internasional  
 Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar serta Cukai. Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018, Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar 1,32 persen dari keseluruhan penerimaan perpajakan.

**Grafik II.4 Perbandingan Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



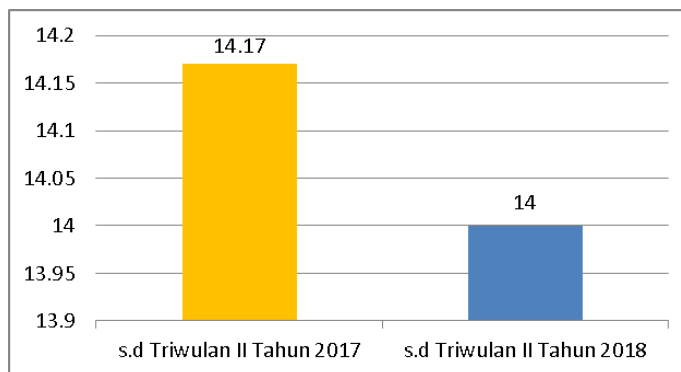
Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Sampai akhir Triwulan II Tahun 2018 penerimaan Bea Masuk memberikan kontribusi sebesar 0,89 persen dari seluruh penerimaan pajak. Penerimaan Bea Masuk sampai akhir Triwulan II Tahun 2018 mencapai Rp6,58 miliar, lebih besar dari Triwulan II tahun sebelumnya yang mencapai Rp450 juta. Sedangkan penerimaan Bea Keluar yang pada akhir Triwulan II Tahun 2017 mencapai Rp4,54 miliar, mengalami penurunan pada akhir Triwulan II Tahun 2018 menjadi sebesar Rp3,25 miliar.

c) Penerimaan PBB dan Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan pajak lainnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2017, ada peningkatan sebesar Rp0,58 miliar. Sumber pendapatan pajak lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,88 persen dari seluruh penerimaan perpajakan.

**Grafik II.5 Perbandingan Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**

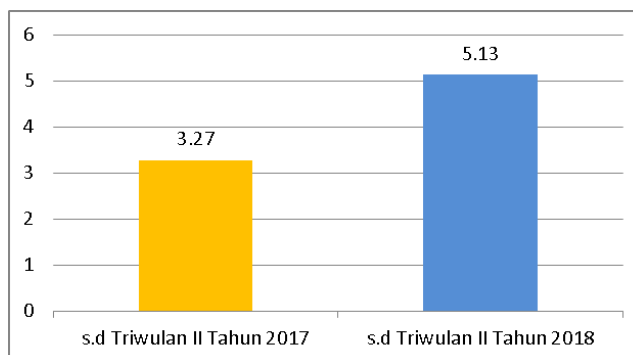


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Akumulasi penerimaan PBB akhir Triwulan II Tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,86 miliar dari Triwulan II Tahun 2017. Namun demikian,

penerimaan PBB sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2018 hanya berkontribusi 0,69 persen dari seluruh penerimaan perpajakan.

**Grafik II.6 Perbandingan Penerimaan PBB Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**

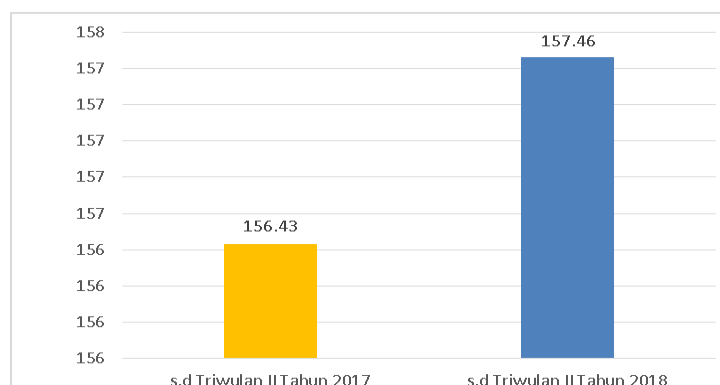


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP di Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar Rp157,46 miliar (Tabel II.1). Apabila dibandingkan dengan periode akhir Triwulan II Tahun 2017, dimana realisasi PNBP sebesar Rp156,43 miliar, maka terjadi peningkatan sebesar Rp1,03 miliar. Sumbangan terbesar diberikan oleh PNBP BLU yang mencapai Rp107,98, sedangkan PNBP Lainnya sekitar Rp49,48 miliar.

**Grafik II.7 Realisasi PNBP BLU Lingkup Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

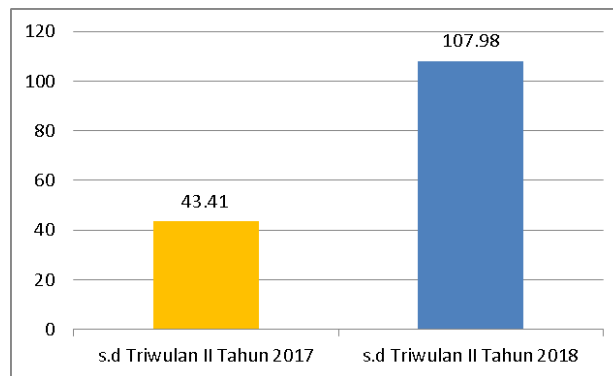
Pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan jumlah PNBP dari tahun ke tahun, untuk menopang penerimaan dalam negeri. Hal ini perlu dioptimalkan, karena sampai dengan saat ini PNBP masih kecil kontribusinya dibanding penerimaan perpajakan. Upaya mengoptimalkan kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara, diperlukan beberapa langkah strategis, misalnya melakukan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan PNBP terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi dalam pengelolaan PNBP tersebut. Dengan begitu diharapkan PNBP yang dibayarkan oleh para wajib bayar bisa lebih akurat, transparan dan akuntabel. Hal lain yang juga perlu dilakukan

oleh pemerintah adalah mengkaji ulang tarif dari PNBP serta mengoptimalkan pemanfaatan MPN G2 sebagai Sistem Penerimaan Negara.

a) Penerimaan PNBP Badan Layanan Umum

Penerimaan PNBP BLU yang pada akhir Triwulan II tahun 2017 mencapai Rp,43,41 miliar, pada akhir Triwulan II tahun 2018 menncapai Rp107,98 miliar. Selanjutnya penerimaan PNBP BLU pada Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik II.8 Realisasi PNBP Lainnya Lingkup Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



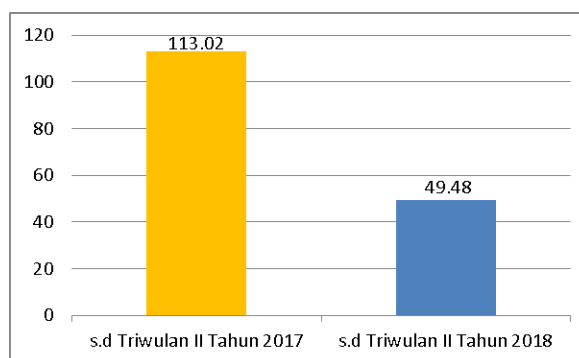
Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Dibandingkan dengan penerimaan PNBP BLU sampai akhir Triwulan II Tahun sebelumnya, penerimaan PNBP BLU sampai akhir Triwulan II Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp64,57 miliar.

b) Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya sampai akhir Triwulan II Tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar Rp49,48 miliar atau 29,55 persen dari seluruh penerimaan PNBP. Realisasi penerimaan PNBP Lainnya Lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik II.9 Realisasi PNBP Lainnya Lingkup Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Realisasi PNBP Lainnya untuk periode akhir Triwulan II Tahun 2018 yaitu sebesar Rp49,48 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari jumlah yang dicapai pada akhir Triwulan II Tahun 2017 yang mencapai Rp55,97 miliar. Jumlah penerimaan PNBP Lainnya

yang signifikan ini terutama terjadi pada Triwulan II Tahun 2018 terutama untuk pendapatan STNK, BPKB kendaraan, penerbitan SIM dan tanda nomor kendaraan bermotor.

### 3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan periode akhir Triwulan II tahun 2018, belum ada realisasi pendapatan hibah di wilayah Bengkulu.

## B. Belanja Negara

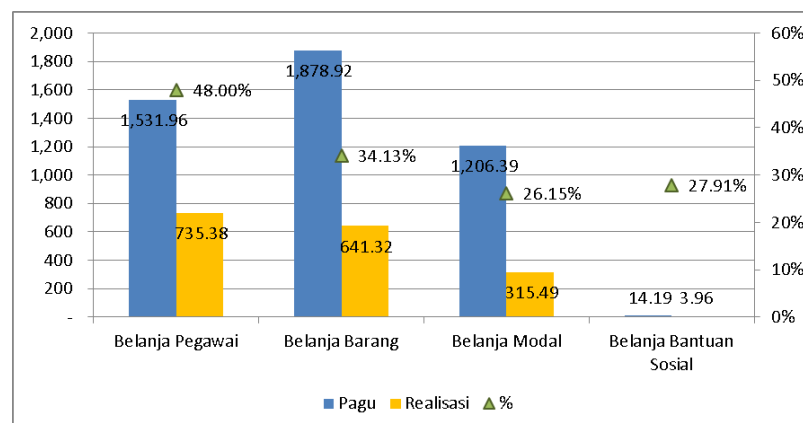
Alokasi belanja negara pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 14,05 triliun. Sebagian besar dari Belanja Negara tersebut yaitu sebesar Rp. 9,56 triliun atau 68,04 persen dari total Belanja Negara berupa alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sedangkan alokasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp4,49 triliun atau sekitar 31,96 persen dari total Belanja Negara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di wilayah Provinsi Bengkulu. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan pembangunan di wilayah Provinsi Bengkulu dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan hasilnya segera bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun belanja negara lingkup Provinsi Bengkulu dapat dibagi menjadi kelompok besar yaitu:

### 1. Belanja Pemerintah Pusat

Pagu belanja terbesar dialokasikan dalam jenis Belanja Barang sebesar Rp1.878,92 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp1.206,39 miliar. Namun demikian, jika dilihat dari tingkat penyerapan Belanja Pegawai memiliki tingkat penyerapan terbesar yaitu 48 persen. Sedangkan tingkat penyerapan jenis belanja Belanja Barang sebesar 34,13 persen. dan Belanja Modal sebesar 26,15 persen. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi sebesar 27,91 persen.

**Grafik II.10 Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Bengkulu s.d Triwulan II Tahun 2018**



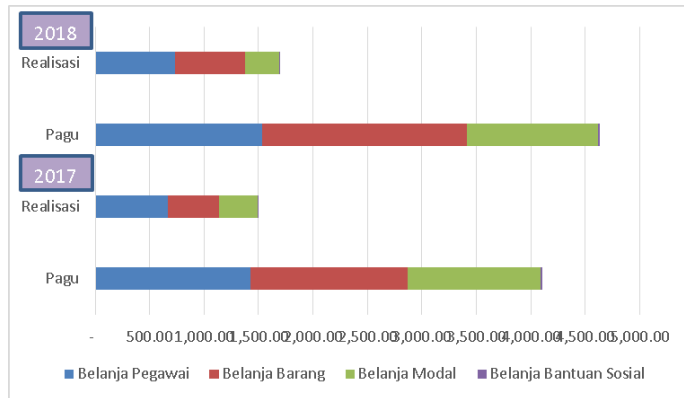
Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Realisasi Belanja Pegawai relatif stabil dalam hal penyerapan karena sifat belanja pegawai yang rutin pencairannya dalam tiap bulan. Selain pola pembayaran Belanja Pegawai yang bersifat rutin tiap bulan, penyerapan Belanja Pegawai juga

dipicu dengan adanya pembayaran THR pada bulan Juni 2018. Sedangkan untuk Belanja Barang, pada Bantuan Pemerintah masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sehingga belum semua SPJ disampaikan. Sedangkan realisasi Belanja Modal, masih pada tahap penyelesaian pekerjaan. Adapun potensi masalah pada Belanja Modal adalah keterlambatan pendaftaran data kontrak dan penyelesaian tagihan, penumpukan tagihan/SPM pada akhir tahun anggaran dan keterlambatan pengajuan SPM-LS ke KPPN pada akhir jadwal pembayaran.

Sedangkan perbandingan realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dengan sampai dengan Triwulan II tahun 2017, realisasi pada periode sampai dengan Triwulan II tahun 2018 mencapai 36,62 persen. Capaian ini mengalami sedikit peningkatan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 36,42 persen .

**Grafik II.11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II Tahun 2017 dengan Triwulan II Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**

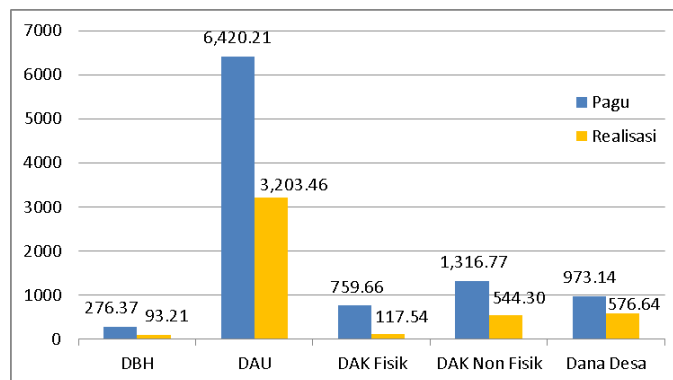


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

## 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pada tahun 2018 Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dialokasikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp9,75 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Rincian realisasi sebagaimana grafik berikut.

**Grafik II.12 Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Akhir Triwulan II Tahun 2018**



Sumber: Simtrada dan SPAN (diolah)

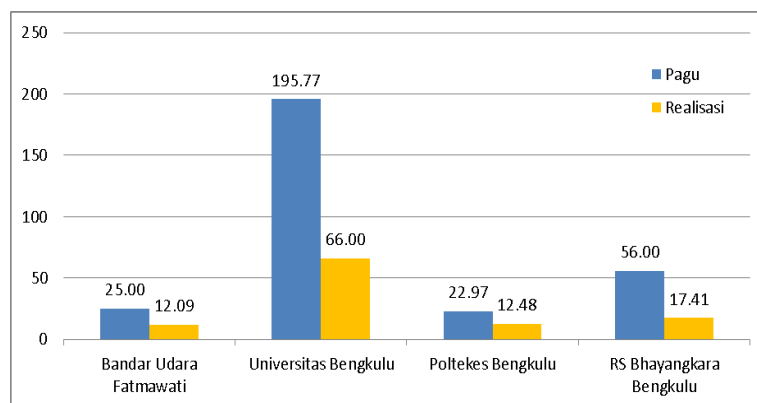
Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2018, realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4,54 triliun atau mencapai 46,58 persen dari pagu TKDD. Rincian realisasi adalah DAU sebesar Rp3,20 triliun, DBH sebesar Rp93,21 miliar, DAK Fisik terealisasi sebesar Rp117,54 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp544,30 miliar dan Dana Desa sebesar Rp576,64 miliar.

Penyaluran dana transfer khususnya DAK Fisik dan Dana Desa selama Triwulan II 2018 belum optimal. Kendala yang terjadi dalam penyaluran DAK Fisik adalah adanya keterlambatan/kegagalan dalam proses pelelangan yang menyebabkan gagal salur. Sedangkan pada Dana Desa antara lain dikarenakan keterlambatan dalam hal penyampaian laporan dari Kepala Desa ke Bupati yang pada akhirnya menyebabkan terlambat pencairan Dana Desa dari RKUN ke RKUD. Selain hal tersebut, penyerapan Dana Desa juga masih rendah yang seharusnya minimal penyerapan 75% dengan output minimal 50%.

### 3. Pengelolaan BLU

Satker yang menerapkan PPK BLU di wilayah Bengkulu ada 4 satker, yaitu Bandar Udara Fatmawati, Universitas Bengkulu, Politeknik Kesehatan Bengkulu dan RS Bhayangkara Bengkulu. Total pagu BLU dari keempat satker tersebut adalah sebesar Rp299,74 miliar. Realisasi penerimaan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2018 adalah sebesar Rp107,98 miliar. Rincian Pagu dan Realisasi Penerimaan pada masing-masing Satker BLU sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik II.13 Pagu dan Realisasi Penerimaan PNPB pada Satker BLU Lingkup Provinsi Bengkulu s.d akhir Triwulan II Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Sedangkan total pagu belanja pada seluruh Satker BLU Lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018 yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB adalah sebesar Rp623,88 miliar, dengan realisasi belanja sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar Rp166 miliar. Berdasarkan persentase realisasi, Satker RS Bhayangkara Bengkulu dan Poltekkes Bengkulu telah mencapai lebih dari 30 persen yaitu masing-masing 37,18 persen dan 33,778 persen. Sedangkan realisasi belanja satker Bandar Udara Fatmawati merupakan yang terkecil yaitu sebesar Rp22,55 miliar (16,14 persen).

#### 4. Manajemen Investasi Pusat

Data Penyaluran KUR sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018 per Bank/Penyalur lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2 Penyaluran KUR per Bank/Penyalur Lingkup Provinsi Bengkulu s.d akhir Triwulan II Tahun 2018 (dalam juta Rp)**

No	Bank/Penyalur	Jumlah Debitur	Nilai Penyaluran (dalam juta rupiah)
1	Bank Rakyat Indonesia	14,106	318,475.69
2	Bank Mandiri	2,145	181,184.25
3	Bank Negara Indonesia 1946	114	28,030.00
4	Bank Artha Graha Internasional	1	20.93
5	PT BPD Lampung	1	100.00
6	BPD Bengkulu	109	17,715.00
7	Bank Tabungan Negara	2	120.00
8	BRI Syariah	357	8,238.50
9	CTBC Bank	4	65.16
10	SIKP UMi	111	647.30
<b>Total Penyaluran</b>		<b>16,950</b>	<b>554,596.82</b>

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), data diolah

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2018, KUR yang telah tersalur di Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp554,59 miliar rupiah, yang disalurkan kepada 16.950 debitur. Sebagian besar disalurkan oleh Bank BRI Cabang Bengkulu yang menyalurkan sebesar Rp318,47 miliar kepada 14.106 debitur. KUR yang disalurkan lewat Bank BRI sebagian besar merupakan KUR Mikro. Sedangkan Bank BNI 1946 dan Bank Mandiri lebih menasar pada penyaluran KUR Kecil. Penyaluran UMi di Provinsi Bengkulu juga mulai teralisasi yang disalurkan melalui Pegadaian. Realisasi UMi pada akhir Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar Rp647,30 juta yang diberikan kepada 111 debitur.

#### C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan akhir tahun 2018 dalam lingkup Provinsi Bengkulu menggunakan regresi linier dengan mempertimbangkan pola realisasi triwulan sebagaimana tertera dalam tabel II.3 berikut:

**Tabel II.3 Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan IV Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	2.605,85	900,42	34,55%	2.192,64	84,14%
Belanja Negara	14.377,61	6.231,30	43,34%	14.463,70	102,90%
Surplus/Defisit	(11.771,76)	(5.330,88)		(12.271,06)	



### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Informasi perkembangan dan analisis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditampilkan berupa data agregat APBD seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota), sebagaimana tabel III.1 berikut.

**Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu  
s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PAD</b>	<b>1.469,42</b>	<b>525,70</b>	<b>1.754,44</b>	<b>662,33</b>
Pajak Daerah	784,71	303,39	867,92	321,29
Retribusi Daerah	58,93	19,06	59,55	13,63
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	53,10	40,83	58,13	32,48
Lain-Lain PAD yang Sah	572,68	162,42	759,84	294,94
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>10.455,10</b>	<b>5.145,91</b>	<b>10.014,71</b>	<b>4.562,88</b>
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	9.169,66	4.484,93	8.773,01	3.958,51
Dana Bagi Hasil Pajak	191,45	94,56	178,98	50,24
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	144,94	69,02	97,39	42,97
Dana Alokasi Umum	6.574,263	3.545,84	6.420,21	3.203,46
Dana Alokasi Khusus	2.259,02	775,51	2.076,43	661,84
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	1.035,34	620,61	973,14	576,64
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian (Dana Desa)	1.035,34	620,61	973,14	576,64
<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	215,49	38,85	265,44	27,73
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	215,49	38,85	265,44	27,73
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
<i>Transfer Bantuan Keuangan</i>	24,60	1,51	3,11	0
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	24,60	1,51	3,11	0
<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>137,05</b>	<b>89,09</b>	<b>80,82</b>	<b>7,66</b>
Pendapatan Hibah	17,00	32,93	55,94	0
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	120,05	56,17	24,88	7,66
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>12.051,58</b>	<b>5.760,70</b>	<b>11.840,96</b>	<b>5.232,87</b>
<b>BELANJA</b>				
Belanja Pegawai	4.708,54	1.988,97	5.002,30	1.981,21
Belanja Barang	2.639,33	718,42	3.127,93	625,22
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	9,62	2,03	0,20	0
Belanja Hibah	451,52	187,78	437,01	237,88
Belanja Bantuan Sosial	9,62	0,29	7,59	0,88
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Belanja Modal	2.883,53	359,56	2.251,81	267,39
Belanja Tidak Terduga	19,40	0,08	15,33	0,03
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH</b>				
Transfer/Bagi Hasil ke Prov/Kab/Kota/Desa	296,40	37,54	279,79	38,83
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	296,40	37,54	279,79	38,83
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	1.351,13	733,78	1.399,13	662,85
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda lain	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.346,51	731,42	1.392,61	662,35
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4,62	2,36	6,51	0,50
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>12.362,24</b>	<b>4.028,46</b>	<b>12.521,08</b>	<b>3.814,28</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(310,67)</b>	<b>1.732,24</b>	<b>(680,12)</b>	<b>1.418,58</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD (LRA) BKD Prov/Kab/Kota wilayah Provinsi Bengkulu (data diolah)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, total pagu pendapatan di wilayah provinsi Bengkulu secara agregat mengalami penurunan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, demikian juga dengan total realisasi pendapatan mengalami penurunan. Sedangkan untuk jumlah pagu belanja dan transfer mengalami kenaikan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya namun realisasinya mengalami penurunan. Tingkat realisasi untuk pendapatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 baru mencapai 44,19 persen, mengalami peningkatan di banding tahun 2017 pada periode yang sama yaitu sebesar 47,80 persen. Sedangkan tingkat realisasi jumlah belanja dan transfer sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 baru mencapai 30,46 persen turun dibanding tahun 2017 pada periode yang sama yaitu sebesar 32,59 persen.

## A. Pendapatan Daerah

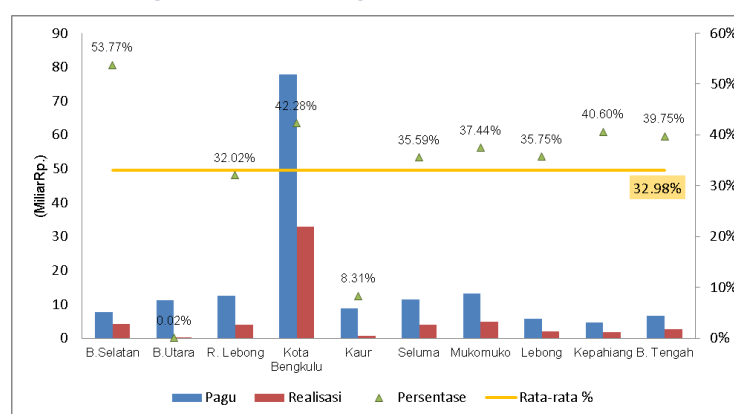
### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 realisasi PAD agregat seluruh Pemda lingkup provinsi Bengkulu mencapai Rp662,33 miliar (37,95 persen dari target). Perbandingan total target PAD dengan total target Pendapatan Daerah masih rendah yaitu dengan rasio hanya sebesar 14,74 persen. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian Pemda dalam membiayai belanjanya melalui pendapatan asli daerah. Secara umum besaran target PAD di lingkup provinsi Bengkulu masih tergantung pada penerimaan pajak daerah. Rasio target Pajak Daerah dengan total target PAD adalah sebesar 49,73 persen yang berarti lebih dari setengah target PAD merupakan target Pajak Daerah. Sedangkan rasio target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dengan total target PAD, adalah sebesar 3,41 persen; 3,33 persen dan 43,53 persen.

#### a) Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik III.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**



Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov.Bengkulu (data diolah)

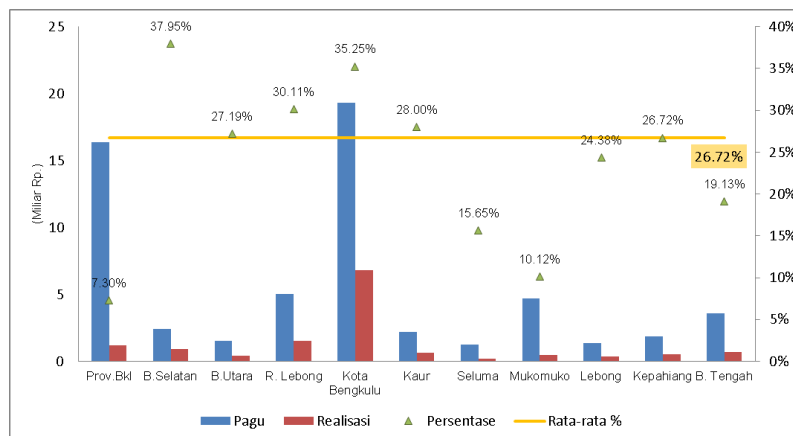
Realisasi Pajak Daerah di lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp321,29 miliar atau mencapai 37,02 persen dari target sebesar Rp867,92 miliar. Untuk Kabupaten lingkup Provinsi Bengkulu, persentase realisasi tertinggi untuk Pajak Daerah dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 53,78 persen dari target, dan tingkat realisasi

terendah adalah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 0,02 persen. Secara nominal penerimaan realisasi pajak terbesar adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp.264,01 miliar dan Pemerintah Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp39,92 miliar dimana tingkat realisasi untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar 37,26 persen dan Pemerintah Kota Bengkulu sebesar 42,28 persen.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik III.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**



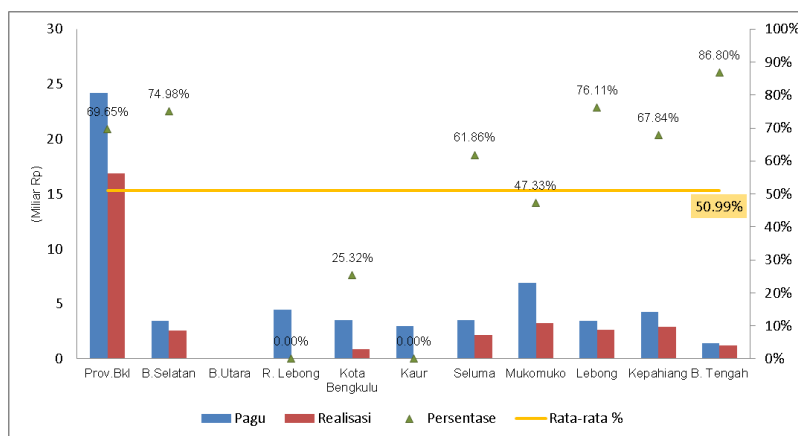
Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov.Bengkulu (data diolah)

Realisasi Retribusi Daerah di lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp13,63 miliar atau mencapai 22,89 persen dari target retribusi daerah sebesar Rp59,55 miliar. Tingkat realisasi retribusi daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 37,95 persen, sedangkan realisasi terendah dicatatkan oleh Provinsi Bengkulu sebesar 7,30 persen.

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik III.3 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**



Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov.Bengkulu (data diolah)

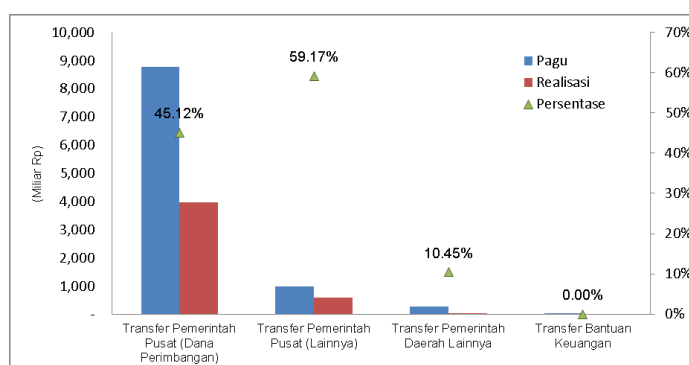
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sudah terealisasi sebesar Rp32,48 miliar atau sudah mencapai 55,87 persen dari target. Tingkat realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 86,80 persen, sedangkan yang masih belum ada realisasi adalah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur. Pemda yang tidak memiliki target untuk jenis penerimaan ini adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Penerimaan dalam kelompok pendapatan ini adalah Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Pencapaian realisasi atas target PAD secara agregat dari seluruh Pemda lingkup provinsi Bengkulu tanpa Lain-lain PAD Yang Sah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 yaitu 37,28 persen menurun dibanding capaian realisasi PAD pada periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 40,51 persen. Secara umum hampir seluruh Pemda lingkup provinsi Bengkulu mengalami penurunan tingkat realisasi target PAD dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

## 2. Pendapatan Transfer

Perkembangan pagu dan realisasi untuk masing-masing dana transfer sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebagaimana grafik III.4 berikut ini:

**Grafik III.4 Total Realisasi Transfer Dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**



Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov.Bengkulu (data diolah)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, total pagu pendapatan transfer adalah sebesar Rp.10.023,96 miliar dengan total realisasi sebesar Rp4.567,50 miliar (45,57 persen). Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) yang terdiri dari DBH Pajak/DBH SDA, DAU dan DAK masih merupakan pendapatan transfer terbesar yang diterima oleh pemerintah daerah di tahun 2018 dengan rasio sebesar 74,09 persen dari total pendapatan transfer. Sedangkan Transfer Pemerintah Lainnya (Dana Desa) sebesar 9,72 persen dari total pendapatan transfer. Pendapatan Transfer dan realisasinya di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 secara agregat turun dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

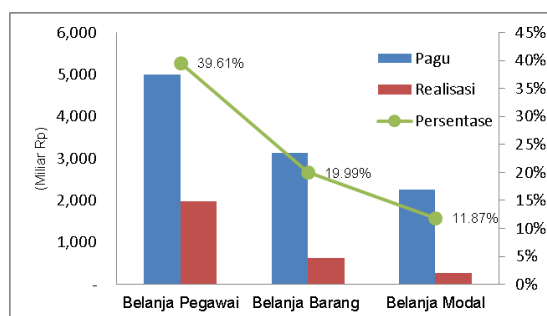
Termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah pendapatan Hibah dan pendapatan lainnya termasuk Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima oleh pemda. Berdasarkan data realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, realisasi penerimaan kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal

dari DID sebesar Rp4,63 miliar dan pendapatan lain-lain yaitu sebesar Rp3,03 miliar. Sedangkan Hibah belum ada realisasinya. Terdapat 3 (tiga) pemerintah daerah yang memiliki pagu Hibah yaitu Kab.Rejang Lebong, Kab.Kepahiang dan Kota Bengkulu dengan total sebesar Rp55,94 miliar. Sedangkan 2 (dua) pemerintah daerah menerima DID untuk tahun 2018 yaitu Kab.Lebong (Rp26,75 miliar) dan Kabupaten Kaur (Rp9,25 miliar) dengan total sebesar Rp36,00 miliar.

## B. Belanja Daerah

Total pagu belanja daerah tahun 2018 turun sebesar 2,75 persen dibanding pagu belanja tahun sebelumnya. Penurunan pagu belanja khususnya dikarenakan alokasi belanja modal yang berkurang cukup signifikan sebesar Rp643,89 miliar (22,33 persen).

**Grafik III.5 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal s.d. Triwulan II Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**



Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov.Bengkulu (data diolah)

Pagu anggaran belanja pegawai merupakan pagu belanja dengan tingkat rasio terbesar yaitu sebesar 39,95 persen dibanding total jumlah pagu belanja dan transfer secara keseluruhan. Adapun tingkat realisasi belanja pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 adalah 39,61 persen (Rp1.981,21 miliar) dari pagu anggarannya (Rp5.002,30 miliar). Sementara itu, belanja modal masih termasuk rendah tingkat realisasinya yaitu baru mencapai 11,87 persen yang dikarenakan beberapa pemda masih dalam tahap proses lelang.

## C. Prognosis Realisasi APBD

Perkiraan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2018 dalam lingkup Provinsi Bengkulu menggunakan regresi linier dengan mempertimbangkan pola realisasi triwulan sebagai berikut:

**Tabel III.2 Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan IV Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	11.840,96	5.232,87	44,19%	11.426,53	96,50%
Belanja Daerah	12.521,08	3.814,28	30,46%	11.206,37	89,50%
Surplus/Defisit	(690,12)	1.418,58		220,16	

## IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam suatu periode. LKPK sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebagaimana tertera dalam tabel IV.1 berikut.

**Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian  
Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan II Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)**

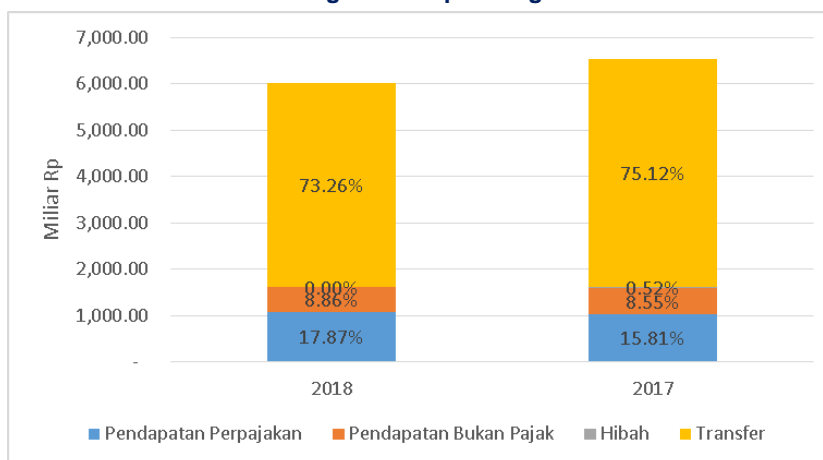
Uraian	2018			2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Konsolidasi
Pendapatan Negara	923.53	5,106.63	1,612.30	1,626.10
Pendapatan Perpajakan	742.88	334.92	1,077.80	1,033.29
Pendapatan Bukan Pajak	180.65	353.85	534.51	558.81
Hibah	-	-	-	34.00
Transfer	-	4,417.86 <sup>*)</sup>	4,417.86 <sup>*)</sup>	4,910.16
Belanja Negara	6,988.53	3,985.69	5,750.61	5,571.17
Belanja Pemerintah	1,764.93	3,321.59	5,086.52	5,569.46
Transfer	5,223.60	664.09	664.09	1.71
Surplus/(Defisit)	(6,064.99)	1,120.94	(4,138.31)	(3,945.07)
Pembiayaan	-	(14.78)	(14.78)	8.47
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	10.10	10.10	8.97
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	24.88	24.88	0.50
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(6,064.99)	1,106.16	(4,153.09)	(3,936.59)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Prov.Bengkulu

### B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan konsolidasi tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal.

**Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II**



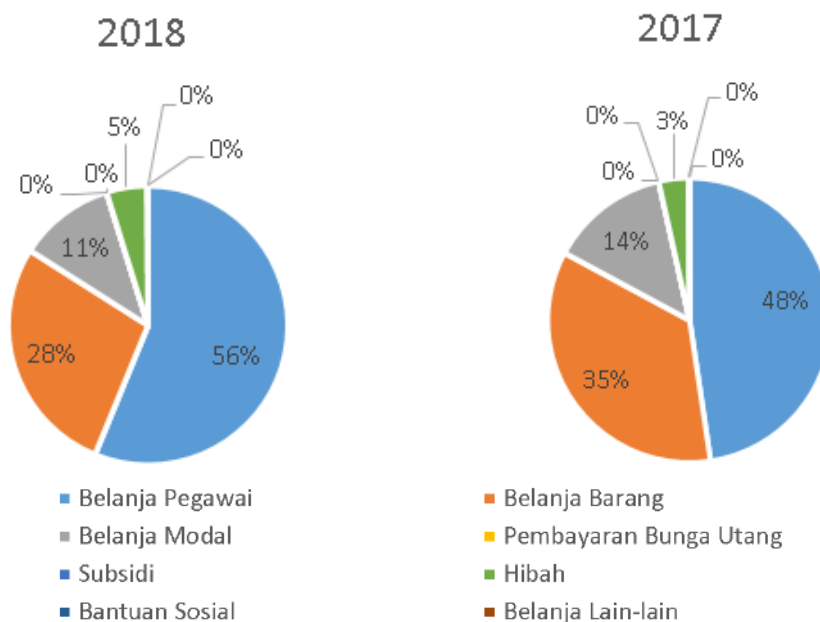
Sumber: LRA Pemerintah Konsolidasian Tk. Wilayah Prov.Bengkulu

Pendapatan negara Triwulan II Tahun 2018 secara total mengalami penurunan dibandingkan periode Triwulan II Tahun 2017. Penurunan tersebut terutama disebabkan pendapatan yang berasal dari hibah dan pendapatan transfer. Sedangkan porsi pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak pada jika dibandingkan dengan priode Triwulan II Tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan yaitu masing-masing sebesar 2,06 persen dan 0,31 persen. Selanjutnya penurunan pos pendapatan transfer mengindikasikan adanya pengurangan porsi pendapatan transfer dalam upaya meningkatkan kemandirian Pemda. Disisi lain, perlu dicermati penurunan pendapatan bukan pajak secara total (konsolidasi) dengan terus mengali sumber-sumber perpajakan pusat maupun daerah.

### C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja konsolidasi tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

**Diagram IV.1 Perbandingan Belanja Konsolidasian di Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II**



Sumber: LRA Pemerintah Konsolidasian Tk. Wilayah Prov.Bengkulu

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, porsi belanja pemerintah daerah lebih besar dari pemerintah pusat. Belanja pegawai merupakan belanja dengan porsi terbesar yang mencapai 63,79 persen untuk belanja pemerintah daerah dan 41,91 persen untuk belanja pemerintah pusat. Sedangkan porsi belanja modal relatif kecil yaitu 8,05 persen untuk belanja pemerintah daerah dan 17,07 persen untuk belanja pemerintah pusat. Prioritas belanja yang masih dipergunakan untuk *mandatory spending* (belanja pegawai dan belanja barang) perlu diupayakan kepada belanja yang memberikan manfaat jangka panjang dan dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

#### **D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

PDRB merupakan penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Analisis kontribusi pemerintah dalam perekonomian berdasarkan data Laporan Operasional (*Statement of Government Operations*).

Kontribusi pemerintah terhadap PDRB terutama diukur dari besaran belanja pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja pemerintah diproxikan dari nilai pengeluaran konsumsi pemerintah yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga dikurangi penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai investasi diproxikan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap.

Berdasarkan laporan operasional, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB sebesar 26,17 persen sedangkan kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB sebesar 3,48 persen. Dengan demikian kontribusi belanja pemerintah memegang peran yang sangat besar. Hal tersebut dicerminkan dari besarnya kompensasi pegawai yang mencapai Rp2,86 triliun atau 66,80 persen dari total besaran belanja pemerintah (G). Sebaliknya investasi, memberi kontribusi yang relatif kecil terhadap perekonomian. Dalam jangka pendek hal ini memberikan dampak positif bagi peningkatan output ekonomi. Namun dalam jangka panjang peran investasi sangat perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan secara inklusif. Dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor pendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu, kontribusi belanja pemerintah perlu diupayakan menurun sejalan dengan peningkatan kontribusi investasi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan penciptaan investasi masuk ke Provinsi Bengkulu harus terus diupayakan.



## V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

### **Review Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa di Provinsi Bengkulu**

Urgensi percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional menjadikan Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mulai Tahun 2017 mengalami perubahan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017, ditetapkan bahwa penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh 4 (empat) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang wilayah kerjanya meliputi 11 (sebelas) pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu.

Tata cara pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai tahun 2018 mengalami perubahan dibanding tahun 2017. Untuk penyaluran DAK Fisik yang semula dilaksanakan secara triwulanan diubah menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap I (25%) paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli, tahap II (45%) paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober, dan tahap III (selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan) paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember. Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa yang sebelumnya dilaksanakan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%, menjadi 3 (tahap) yaitu tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 40%. Lebih lanjut, teknis penyaluran DAK Fisik tahap I dan DAK Fisik sekaligus TA 2018 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2018, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan TA 2017, rencana kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) teknis terkait dan daftar kontrak kegiatan. Sedangkan persyaratan untuk penyaluran Dana Desa tahap I TA 2018 berupa surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2018 dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan setelah dokumen persyaratan penyaluran di-input oleh Pemerintah Daerah melalui Aplikasi OM SPAN. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah, dalam hal ini dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya untuk DAK Fisik, dana disalurkan dari RKUD ke Rekening Pihak Ke-III (vendor). Sedangkan untuk Dana Desa, dana disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Alokasi DAK Fisik untuk wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp759,66 miliar. Dari pagu tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 telah terealisasi Rp117,54 miliar (15,47%). Rincian penyaluran DAK Fisik TA 2018 per KPPN per pemda di wilayah provinsi Bengkulu sebagaimana ditampilkan pada Tabel V.1.

**Tabel V.1 Penyaluran DAK Fisik TA 2018 per Pemda s.d. tanggal 30 Juni 2018  
(dalam Miliar Rupiah)**

No	KPPN dan Pemda	Total Pagu	Realisasi Penyaluran			% Realisasi	Sisa Pagu
			Tahap I	Tahap II	Sekaligus		
1.	<b>KPPN Bengkulu</b>	294,69	56,42	-	-	19,15	238,26
	Provinsi Bengkulu	122,24	20,32	-	0,82	17,30	101,10
	Kab. Bengkulu Tengah	50,91	6,27	-	-	12,31	44,66
	Kab. Bengkulu Utara	74,59	17,87	-	0,91	25,18	55,81
	Kota Bengkulu	46,94	10,23	-	-	21,79	36,72
2.	<b>KPPN Curup</b>	205,33	29,74	-	-	14,48	175,59
	Kab. Rejang Lebong	101,29	11,29	-	-	11,15	90,00
	Kab. Kepahiang	54,58	12,21	-	-	22,37	42,37
	Kab. Lebong	49,45	5,24	-	1,00	12,61	43,12
3.	<b>KPPN Manna</b>	207,53	21,23	-	-	10,23	186,30
	Kab. Bengkulu Selatan	66,17	11,49	-	-	17,36	54,68
	Kab. Seluma	85,91	8,02	-	-	9,33	77,89
	Kab. Kaur	55,45	1,35	-	0,38	3,11	53,73
4.	<b>KPPN Mukomuko</b>	52,11	10,15	-	-	19,47	41,96
	Kab. Mukomuko	52,11	10,15	-	-	19,47	41,96
<b>J u m l a h</b>		<b>759,66</b>	<b>114,43</b>	<b>-</b>	<b>3,11</b>	<b>15,47</b>	<b>642,11</b>

Sumber: Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I Tahun 2018

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 DAK Fisik tahap I sudah tersalurkan ke seluruh pemda namun baru mencapai 15,22% dari ketentuan 25% dari pagu alokasi. Sedangkan untuk penyaluran sekaligus baru mencapai 39,39% dari total pagu yang dapat disalurkan secara sekaligus. Pemda dengan realisasi penyaluran tertinggi adalah pemerintah kabupaten Bengkulu Utara sebesar 25,18% dan terendah adalah pemerintah kabupaten Kaur baru mencapai 3,11% dari alokasi pagu.

Sedangkan alokasi Dana Desa untuk wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp946,39 Miliar. Dari pagu tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 telah terealisasi Rp563,27 miliar (59,52%). Rincian alokasi pagu dan realisasi penyaluran Dana Desa untuk wilayah provinsi Bengkulu sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat dilihat pada Tabel V.2. berikut ini.

**Tabel V.2 Realisasi Penyaluran Dana Desa TA 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2018  
(dalam Miliar Rupiah)**

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Desa	Penyaluran				Sisa di RKUD
			RKUN ke RKUD	%	RKUD ke RKD	%	
1	Bengkulu Tengah	142	55,89	56,92	54,80	98,05	1,09
2	Bengkulu Utara	215	87,13	59,38	29,17	33,48	57,96
3	Rejang Lebong	122	58,52	60,00	58,47	99,92	0,05
4	Kepahiang	105	44,97	60,00	44,97	100,00	-
5	Lebong	93	40,40	59,10	40,37	99,93	0,03
6	Bengkulu Selatan	142	58,43	59,99	50,24	85,97	8,19
7	Seluma	182	76,02	60,00	47,86	62,96	28,16
8	Kaur	192	77,98	60,00	70,32	90,18	7,66
9	Mukomuko	148	63,93	60,00	21,31	33,33	42,62
<b>Jumlah</b>		<b>1.341</b>	<b>563,27</b>	<b>59,52</b>	<b>417,51</b>	<b>74,12</b>	<b>145,76</b>

Sumber: Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester I Tahun 2018

Sampai dengan batas akhir penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 (29 Juni 2018), seluruh Pemda (Kabupaten) telah menerima penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan per-tahap yaitu tahap I (20%) dan tahap II (39,52%) atau secara total sebesar  $\pm 60\%$ . Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD secara total telah tersalurkan Rp417,51 miliar (74,12%), sedangkan penyerapan Desa baru mencapai Rp5,93 miliar atau 10,70% (data *Online-Monitoring* SPAN per 31 Juli 2018).

Kurang optimalnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tersebut merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan mekanisme penyaluran dana tersebut yang melalui KPPN sebagaimana telah disinggung pada paragraf sebelumnya terdapat beberapa tantangan. Tantangan dimaksud antara lain:

- 1) Terbatasnya SDM pada OPD/Dinas dalam menangani/membantu proses administrasi pertanggungjawaban dana desa dikarenakan jumlah desa yang cukup banyak;
- 2) Terdapat kendala pada saat perekaman data oleh operator OMSPAN di Pemda dikarenakan kualitas jaringan internet yang kurang baik;
- 3) Kurangnya koordinasi antara pihak Pemda dengan pihak Desa sehingga ikut mempengaruhi penyaluran Dana Desa;
- 4) Kurangnya pemahaman baik dari petugas Pemda yang menangani penyaluran Dana Desa maupun petugas perangkat Desa terkait persyaratan penyaluran.

Peran dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. KPPN selaku penyalur dana dalam hal ini perlu melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi dan capaian output untuk menjamin ketepatan waktu penyaluran dan secara bertahap. Selain itu, upaya koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada Pemda terkait kebijakan maupun aplikasi yang digunakan dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar ditingkatkan. Di sisi lain, pihak Pemda khususnya Pemerintah Desa agar terus mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana sehingga kendala penyaluran dapat terselesaikan.